



INTERNASIONALISASI KONFLIK INTERNAL KELOMPOK SEPARATISME EUSKADI TA ASKATASUNA (ETA) DI SPANYOL

Afifah Veriyana Sekar Sari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) was originally only a discussion group for students at Deusto University. However, as a result of dictatorial leadership and discriminatory attitudes adopted by General Francisco Franco, the ETA group was created as a group that carried out all kinds of acts of violence, aimed at liberating the Basque Country. The act of separatism carried out by ETA separatist groups has become a threat to the Spanish state. Various negotiations have been carried out by the Spanish Government in order to build peace in their relations, but have not been able to end internal conflicts that occurred in the country which is a member state of the European Union. One of the strengths of the ETA separatism group comes from the relationship that exists between the ETA separatism group and terrorist groups from other countries that entered the international network. In this study, the author use the theories: Protracted Social Conflict, Conflict Internationalization, and Sources of Contemporary Conflict to explain that internal conflicts that have occurred for more than 50 years are due to the desire of the Basque Country to separate from the Spanish state. The research method used is qualitative which is carried out by collecting and analyzing data, to find out the reasons for internal conflicts between ETA separatism groups and the Government has not been able to find a way of peace.

Keywords: *Euskadi Ta Askatasuna, Spanish Government, Internal Conflict, International Network, European Union, GAL, Peace, Protracted Social Conflict, Conflict Internationalization, Sources of Contemporary Conflict.*

Pendahuluan

Pada masa pemerintahannya, Jenderal Francisco Franco banyak melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada, seperti: (1) adanya larangan untuk menggunakan atribut dan bahasa daerah dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, (2) adanya larangan untuk mengibarkan bendera selain bendera Spanyol dan memusatkan segala kekuasaannya di ibukota, serta (3) intelektual banyak yang di penjara dan disiksa karean kepercayaan mereka terhadap politik dan budaya (Europol Te-Sat EU, 2012).

Akibat dari perubahan kebijakan yang mendatangkan banyak protes terutama dari masyarakat yang bukan berasal dari ibukota, Madrid. Sehingga, hal tersebut memunculkan sebuah kelompok diskusi yang dibentuk oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Deusto, Bilbao, Basque. Kelompok tersebut terbentuk pada tahun 1952 dan

diberi nama Euskadi Ta Askatasuna (ETA) atau juga dapat diartikan sebagai Pembebasan Tanah Basque. Adapun topik utama dari diskusi mereka, yaitu “usaha untuk menentang pemerintahan diktator dari Jenderal Fransisco Franco.” Tepatnya, pada 31 Juli 1959, kelompok ETA ini mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok perlawanan bagi rakyat Basque Country (Council on Foreign Relation, 2008). Dalam pengimplementasiannya, kelompok ETA menjadi sebuah kelompok separatis dan bersenjata. Dalam pengoperasiannya, kelompok ETA melancarkan serangannya di Utara negara Spanyol, yaitu di: Vizcaya, Alava, Navarra, serta Guipozcoa, dan di Barat Daya negara Perancis, yaitu di: Lapurdi, Navarre, serta Zuberoa Soul (Aiertza dan Zabalo, 2010:75).

Dalam melancarkan aksinya, kelompok separatisme ETA mendapatkan dukungan dana dari masyarakat Basque Country. Dana-dana tersebut digunakan oleh kelompok separatisme ETA untuk: melakukan pembunuhan (dengan target utamanya adalah Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Perancis), melakukan serangan bom di tempat-tempat umum, dan melakukan perlawanan gerilya (Europol Te-Sat EU, 2012). Pada tahun 1976, setelah wafatnya Jenderal Fransisco Franco, pemerintah yang menggantikan kepemimpinan Jenderal Fransisco Franco di negara Spanyol memberikan otonomi untuk setiap daerah yang ada di negara Spanyol, termasuk Basque Country (Edles, 1998). Beberapa hak otonomi yang diberikan kepada Basque Country, yaitu: masyarakat Basque dapat mengumpulkan pajaknya sendiri, masyarakat Basque Country dapat mengibarkan bendera *Ukrinna*, serta bahasa *Euskara* yang merupakan bahasa daerah dari Basque Country sudah diakui dan mulai dapat diajarkan di sekolah-sekolah. Namun, hal tersebut belum dapat menghentikan tindakan separatisme yang semakin lama semakin gencar dilakukan oleh kelompok ETA (Edles, 1998).

Berbagai tindakan pencegahan telah seringkali dilakukan oleh Pemerintah Spanyol guna untuk menghentikan tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA. Namun, upaya tersebut belum dapat menghentikan atau bahkan memusnahkan kelompok separatisme ETA. Hal tersebut disebabkan karena adanya jaringan internasional yang telah dibangun oleh kelompok separatime ETA (Alonco, 2011:187). Dalam hal ini, kelompok separatisme ETA telah menjalin hubungan dengan beberapa kelompok teroris dari negara-negara lain, seperti: *Irish Republican Army* (IRA) di Irlandia Utara; *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) di Kolombia; *Front de Libération de la Bretagne* (FLB) di Britania Raya; *The Red Bregades* di Italia; *Baader Meinhof* di Jerman Barat; *Tupamaros* di Uruguay; *Sandinista* di Nikaragua; dan negara-negara di Timur Tengah (Alonco, 2011:187).

Oleh karena itu, tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA mendapatkan kecaman dari berbagai negara, seperti: Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Negara-negara tersebut telah mengkategorikan kelompok separatisme ETA sebagai organisasi terorisme yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah melakukan pemblokiran terhadap aset yang dicurigai milik anggota kelompok separatisme ETA. Sedangkan, Kanada dan Inggris telah memasukkan kelompok separatisme ETA ke dalam Undang-Undang Terorisme Tahun 2002 dan 2003 (Official Journal of the European Union, 2006). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencari alasan mengapa konflik internal yang terjadi antara kelompok separatisme ETA dan Pemerintah Spanyol belum menemukan jalan perdamaian. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, seperti: *Protracted Social Conflict* (PSC), *Conflict Internationalization*, serta *Sources of Contemporary Conflict*.

Pembahasan

Jaringan Internasional Kelompok Separatisme ETA

Untuk mencapai tujuan nasionalisme, kelompok separatisme ETA mulai memperluas jaringan internasionalnya dengan kelompok-kelompok sepejuangannya dari negara-negara lain. Sejak tahun 1970-an, kelompok separatisme ETA telah tergabung ke dalam struktur organisasi yang disebut sebagai “departemen internasional” (Mess, 2003:52). Tujuan dari tergabungnya kelompok separatisme ETA ke dalam struktur organisasi tersebut, yaitu untuk memperluas dan mengembangkan hubungannya dengan organisasi teroris lainnya maupun dengan lembaga-lembaga nasional dari negara-negara lainnya (Mess, 2003:52). Dengan dukungan yang diberikan oleh jaringan internasionalnya, membuat kelompok separatisme ETA menjadi lebih kuat dan lebih berani dalam melakukan tindakan separatisme dan aksi-aksi kekerasan di negara Spanyol (Alonco, 2011:186).

Kelompok-kelompok yang memberikan dukungan terhadap tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA, antara lain: (1) *Irish Republican Army* (IRA). Hubungan yang terjalin antara kelompok separatisme ETA dan kelompok IRA diawali pada akhir tahun 1970-an, ketika aktivis kelompok separatisme ETA berkunjung ke Kerry, Irlandia Utara guna untuk mendapatkan pelatihan untuk penggunaan mortir (Alonco, 2011:186). Pada tahun 1971, Seàn Mac Stiofàin, yang merupakan kepala staf dari kelompok IRA mengadakan pertemuan dengan salah satu perwakilan dari kelompok separatisme ETA. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberikan tawaran bantuan berupa beberapa jenis senjata sebagai imbalan atas pelatihan penggunaan bahan peledak (Alonco, 2011:175). Selain itu, hubungan yang terjalin antara kelompok separatisme ETA dan kelompok IRA juga terlihat dari interaksi dan pertukaran logistik, serta strategi-strategi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, kelompok separatisme ETA juga telah menjadikan kelompok IRA sebagai tempat untuk berlindung (Ward dan Larramendy, 2010:18), (2) *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC). Pada tahun 2010, diketahui bahwa terdapat hubungan erat yang terjalin antara kelompok separatisme ETA dengan Venezuela (Solomon, 2012).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hubungan yang terjalin selama bertahun-tahun antara kelompok separatisme ETA dan kelompok FARC. Selain itu, antara kelompok separatisme ETA dan kelompok FARC juga seringkali melakukan kerjasama dalam berbagai kesempatan. Dengan begitu, segala tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA akan mendapatkan perlindungan dari negara Venezuela (Collins, 2012:38), (3) *Front de Libération de la Bretagne* (FLB). Dalam perjalanannya, kelompok FLB menandatangani kesepakatan untuk bekerjasama dengan kelompok separatisme ETA dan kelompok IRA. Hal tersebut dilakukan agar ketiga kelompok separatisme tersebut dapat saling memberikan bantuan, guna untuk keberhasilan perjuangannya. Dalam hal ini, kelompok FLB memberikan bantuan terhadap tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA berupa: sokongan senjata untuk penyerangan (Solomon, 2012), (4) *Baader Meinhof*. Hubungan yang terjalin antara kelompok separatisme ETA dan *Baader Meinhof* dibuktikan dengan sikap solidaritas yang ditunjukkan oleh *Baader Meinhof* terhadap pergerakan kebebasan yang sedang diperjuangkan oleh kelompok separatisme ETA (Varon, 2007). Dalam hal ini, kelompok separatisme ETA dan *Baader Meinhof* seringkali melakukan diskusi yang berkaitan dengan taktik dan strategi yang digunakan oleh keduanya guna untuk mencapai tujuannya masing-masing (Varon, 2007).

Dengan begitu, kelompok separatisme ETA dan *Baader Meinhof* memiliki taktik dan strategi penyerangan yang serupa, seperti: penculikan, pembunuhan, eksekusi, perampokan, serta pengeboman (Aust, 2008:45), (5) *Tupamaros*. *Tupamaros* memberikan dukungan terhadap tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA dengan cara: memberikan saran-saran penyerangan agar dapat langsung menyerang tepat pada sasarannya (Marchesi, 2015), (6) Dukungan dari negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 1976, lebih dari 60 orang anggota kelompok separatisme ETA diterima secara militer, fisik, maupun pelatihan komunikasi di akademisi di wilayah Souma (Alonco, 2011:189). Pada tahun 1984, pelatihan militer yang diberikan oleh Aljazair terhadap para anggota kelompok separatisme ETA diberikan di pangkalan militer Aljazair. Antara tahun 1979-1980, kelompok separatisme ETA juga mendapatkan pelatihan militer serta memperluas jaringan internasional hingga ke Lebanon dan Yaman (Saideman, 2003:32), (7) Dukungan moral kelompok teroris lainnya. Dukungan moral untuk kelompok separatisme ETA diberikan oleh: (a) *The Red Brigades*. *The Red Brigades* bersama dengan 100 aktivis radikal lainnya di negara Italia mengemukakan bahwa diri mereka sepenuhnya mendukung tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA. Hal tersebut didasari karena kesamaan alasan mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah (Groppi, 2018), (b) *Sandinista*. Dikarenakan persamaan tujuan dari pembentukannya, *Sandinista* menyatakan kelompoknya mendukung penuh atas gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA. Dukungan yang diberikan oleh *Sandinista* digambarkan dengan mengikuti taktik dan strategi penyerangan yang digunakan oleh kelompok separatisme ETA (Merril, 1993).

Faktor Internal Negara Spanyol yang Menghambat Perdamaian

Segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Spanyol untuk meredam tindakan separatis yang dilakukan oleh kelompok ETA. Salah satu upaya negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Spanyol, yaitu memberikan otonomi terhadap Basque Country. Beberapa otonomi yang diberikan kepada Basque Country, bahwa: Basque Country dapat mengatur sendiri sistem parlemen dan pemerintahan lokalnya, dapat melakukan kontrol terhadap pajak, dapat mengatur sistem pendidikannya, serta bahasa Basque, yaitu bahasa *Euskara* dan budaya Basque sudah mulai diajarkan di sekolah-sekolah (Edles, 1998). Namun, hal tersebut masih belum dapat menghentikan tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok ETA.

Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab konflik internal yang terjadi antara kelompok separatisme ETA dan Pemerintah Spanyol belum menemukan jalan perdamaian, yaitu disebabkan karena adanya: (1) Faktor Ekonomi. Ketika sedang terjadi Perang Saudara yang dipimpin oleh Jenderal Fransisco Franco, negara Spanyol mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Hal tersebut mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan kelaparan, terutama di wilayah Basque Country (Nandi, 2016). Sedangkan pada saat itu, perekonomian Basque Country hanya ditopang oleh dua perusahaan saja, yaitu: *Unión Cerrajera* yang telah memiliki 2000 pekerja, di mana 1.200 pekerja berada di *Mondragón* dan 800 pekerja lainnya berada di *Bergera*. Di sisi lain, *Elma* juga telah memiliki 1000 pekerja (Nandi, 2016). Hingga tahun 2015, *Mondragón* telah memiliki 74.334 pekerja, di mana 257 pekerjanya disebarkan di empat bidang yang dimiliki oleh perusahaan, seperti: keuangan, industri, retail, dan pendidikan (Rolland, 2016).

Dengan begitu, pada tahun 2016, total pendapatan yang dihasilkan oleh Mondragón mencapai 12.110 juta euro, dengan total aset senilai 24.725 juta euro. Selain itu, gaji pekerja yang paling tinggi dengan pekerjaan paling rendah, dimulai dengan rasio 3:1 hingga rasio 9:1. Rasio tersebut digunakan agar tidak terjadi ketimpangan sosial diantara para pekerja (Rolland, 2016), (2) Faktor Politik. Jika dilihat dari segi pengelolaan pemerintahannya, Jenderal Fransisco Franco menolak untuk melakukan, baik dalam; pemberlakuan desentralisasi administrasi maupun legislatif. Kelompok-kelompok komunis, liberal, demokrat, hingga separatis yang seringkali tujuan dari pembentukannya guna untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Catalan dan Basque Country akan langsung dihancurkan (Piccioli, 2010:36).

Selain itu, pihak-pihak yang mengumandangkan kritik, terutama kritik-kritik yang disuarakan oleh para mahasiswa juga akan langsung dibungkam (Piccioli, 2010: 42), (3) Faktor Sosial-Budaya. Tradisi budaya yang dimiliki oleh berbagai wilayah di negara Spanyol, yang dianggap tidak mencerminkan negara Spanyol akan dimusnahkan. Dalam hal ini, Jenderal Fransisco Franco melakukan pengontrolan bagi segala macam bentuk budaya dan kesenian dengan cara penyensoran (Lecours, 2007:92). Selain itu, seluruh dokumen pemerintahan, hukum, hingga kontrak-kontrak dagang disusun dalam bahasa Spanyol. Penyelenggaraan pendidikan, periklanan, serta upacara keagamaan juga wajib menggunakan bahasa Spanyol (Lecours, 2007:116). Dalam hal ini, Jenderal Fransisco Franco juga menerapkan larangan penggunaan bahasa daerah, serta melarang adanya serikat pekerja non-pemerintah maupun spektrum politik diluar nasionalisme yang telah dipromosikan oleh pemerintah (Lecours, 2007:116).

Penolakan Pemerintah Spanyol terhadap Upaya Resolusi Konflik Uni Eropa

Uni Eropa merupakan lembaga multinasional di Eropa yang dapat mengakomodasikan permasalahan regional dan subnasional melalui cara-cara diplomatis dan politis. Namun, cara-cara tersebut justru seringkali menimbulkan konflik bersenjata dengan negara induknya. Dalam hal ini, Uni Eropa juga selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi bagi para negara anggotanya (Connolly, 2013:42). Bagi Uni Eropa, negara masih menjadi aktor penting, sehingga wilayah subnasional tidak memiliki hak untuk mengontrol setiap kebijakan yang ada di dalam lingkup Uni Eropa. Sebagai lembaga multinasional, Uni Eropa berkomitmen dalam perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi sebelum diberlakukannya Traktat Lisbon tahun 2009 (Connolly, 2013:42). Setelah diberlakukannya Traktat Lisbon, Uni Eropa memiliki beberapa instrumen atau lembaga khusus yang relevan dalam proses mediasi dan dialog, yaitu: *Common Foreign Security Policy (CSFP)* dan *European Security and Defense Policy (ESDP)*. Kedua lembaga ini memberikan legitimasi terhadap Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan eksternal dalam merespon pelanggaran hukum internasional, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi.

Pada tahun 2010, atas perintah dari Dewan Uni Eropa, CFSP dan ESDP membentuk *European External Action Service (EEAS)*. Tujuan dan tugas dari EEAS yaitu, sebagai upaya untuk pencegahan konflik terhadap upaya peacbuilding dan sebagai instrumen media. Pada dasarnya, Uni Eropa berada dalam situasi dan posisi yang sulit untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi antara kelompok separatisme ETA dan Pemerintah Spanyol (Pleschinger, 2006:55). Hal tersebut disebabkan karena kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok separatisme ETA menjadi salah satu pertimbangan Uni Eropa sulit untuk mewujudkan perdamaian antara kedua belah yang sedang berkonflik (Pleschinger, 2006:55). Selain itu, sikap

yang ditunjukkan oleh Pemerintah Spanyol juga menjadi hal lain yang menghalangi upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Dalam hal ini, Pemerintah Spanyol tidak ingin konflik internal mengenai perjuangan kemerdekaan Basque Country dibahas di Uni Eropa. Bahkan, para diplomat dari negara Spanyol ketika sedang berada di Uni Eropa mencoba untuk menghindari pembahasan mengenai perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Basque Country (Pleschinger, 2006:63). Ketidakinginan Pemerintah Spanyol ketika konflik internalnya dibahas di level Uni Eropa dibuktikan pada Mei 2001, ketika Javier Solana, yang merupakan seorang diplomat negara Spanyol dari CSFP sedang melakukan kunjungan ke Makedonia. Dalam hal ini, ia menolak untuk membicarakan konflik internal yang sedang terjadi di dalam negaranya. Solana mengatakan bahwa isu konflik internal yang terjadi antara kelompok separatisme ETA dan perjuangan kemerdekaan Basque Country lebih baik hanya diselesaikan oleh Pemerintah Spanyol sendiri.

Dikarenakan terdapat kelompok radikal yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Basque Country, Uni Eropa menjadi sulit untuk melakukan upaya perdamaian, baik dengan cara dialog maupun dengan cara negosiasi. Pada tahun 1988, Komisi Eropa membentuk *the Consultative Council of Regional and Local Authorities* (CCRLA). Badan khusus ini dibentuk guna untuk mengasosiasikan otoritas separatisme dan mengimplementasikan kebijakan Uni Eropa di wilayah-wilayah regional (Gokcek, 2008:83). Dalam hal ini, CCRLA ini tidak memiliki fungsi perwakilan yang jelas, di mana CCRLA ini hanya diberikan fungsi sebagai penasehat dan tidak memiliki sifat yang mengikat. Dengan seiring berjalannya waktu, badan khusus ini tidak dapat berfungsi dengan baik, karena pembentukannya tidak dapat membantu menghentikan tindakan separatisme yang terutama terjadi di negara Spanyol (Gokcek, 2008:83).

Karena CCRLA gagal untuk diterapkan, pada tahun 1994, Presiden Komisi Eropa, yaitu: Jacques Delors membentuk sebuah lembaga yang merepresentasikan daerah-daerah regional, separatisme, dan etnis minoritas. Lembaga tersebut diberi nama *Commitee of Region* (CoR) (Gokcek, 2008:85). Pembentukan lembaga tersebut disebabkan karena Uni Eropa terus menerus mendapatkan desakan dari wilayah-wilayah regional yang meminta Uni Eropa memberikan tempat khusus kepada pemerintah regional (Gokcek, 2008:85). Dalam hal ini, CoR diberi tugas untuk mengakomodasikan isu ekonomi, sosial, kerjasama transnasional, kesehatan publik, pendidikan dan budaya. Dengan adanya CoR ini, diharapkan dapat menyampaikan pendapat yang relevan dalam level regional. Disisi lain, CoR memiliki sifat yang sama dengan CCRLA, yaitu tidak memiliki sifat yang mengikat (Gokcek, 2008:85).

Selain itu, dalam Traktat Maastricht pasal 146, Uni Eropa memberikan kesempatan kepada negara-negara anggotanya untuk memberikan hak kepada perwakilan regional yang menjadi delegasi dalam badan utama pengambil keputusan di Uni Eropa (*Council of Ministers*) (Martin, 2012:23). Namun, Basque Country mendapatkan pengecualian, di mana perwakilan Basque Country yang berada di Parlemen Spanyol tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan di Brussels (Martin, 2012:25). Dalam hal ini, Pemerintah Spanyol hanya mengizinkan pemerintah pusat untuk berada di meja pengambil keputusan. Pemerintah Spanyol tidak memberikan tempat bagi institusi Basque Country, karena Pemerintah Spanyol menganggap bahwa Basque Country tidak memiliki kepentingan apapun yang perlu untuk diperjuangkan (Martin, 2012:29).

Dengan gagalnya upaya resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan politik, Uni Eropa berusaha melakukan upaya resolusi konflik dengan menggunakan

pendekatan ekonomi dan sosial, yang dikenal dengan nama Structural Fund. Tujuan dari strategi penggunaan pendekatan ekonomi dan sosial ini yaitu, untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi (Daw, 2012:61). Dalam hal ini, Uni Eropa menerapkan program bantuan ke wilayah Basque Country, sebagai upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Walaupun pendekatan tersebut dapat mengurangi eskalasi konflik yang disebabkan oleh tindakan separatistis yang dilakukan oleh kelompok ETA, namun hal tersebut belum mampu untuk memudahkan keinginan Basque Country untuk memisahkan diri dari negara Spanyol.

Kegagalan Resolusi Konflik yang dilakukan GAL

Walaupun skalanya tidak terlalu besar, namun negara Perancis terkena dampak dari serangan-serangan aksi teror dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatisme ETA. Untuk menghentikan tindakan tersebut, Felipe Gonzales yang pada saat itu merupakan penguasa negara Spanyol menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Perancis (Balfour, 2003:50). Dalam hal ini, Gonzales meminta kepada Pemerintah Perancis untuk mengekstradisi para anggota dari kelompok separatisme ETA ke negara Spanyol. Namun, hal tersebut mendapatkan penolakan dari Pemerintah Perancis. Dalam hal ini, Pemerintah Perancis menyangkal keberadaan kelompok separatisme ETA di dalam negaranya (Balfour, 2003:53). Dengan seiring berjalannya waktu, Pemerintah Perancis mulai merubah pandangannya terhadap kelompok separatisme ETA. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Perancis mendapatkan desakan dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) untuk dapat membantu negara Spanyol. Dengan begitu, Pemerintah Perancis resmi menandatangani kerjasama anti-terorisme dengan negara Spanyol pada tahun 1984 (Jebb, 2003:37).

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Perancis tersebut berhasil membentuk sebuah badan khusus anti-teroris yang diberi nama *Grupos Antiterrorista de Liberacion* (GAL) (Jebb, 2003:57). GAL merupakan sebuah organisasi yang berada dibawah naungan militer negara Spanyol, khususnya dalam hal intelijen. Berdasarkan kesepakatan diantara kedua negara tersebut, GAL diberikan wewenang untuk bebas memasuki wilayah otoritas negara Perancis tanpa harus melalui mekanisme birokrasi yang dimiliki oleh negara Perancis (Jebb, 2003:64). Adapun tugas resmi yang diberikan oleh GAL, yaitu: memerangi pemberontakan, di mana pengoperasian pertama yang dilakukan oleh GAL terjadi pada tahun 1985. Hasilnya, GAL berhasil menangkap pengungsi dari Basque Country di perbatasan antara Basque Country dan negara Perancis (Jebb, 2003:85).

Namun, dalam waktu yang bersamaan pula GAL juga seringkali menebar keresahan bagi masyarakat sipil. Pasalnya, sejak tahun 1983 hingga tahun 1987, GAL telah melakukan pembunuhan dengan jumlah korban lebih dari 20 juta orang, di mana sepertiga dari korbannya merupakan warga sipil dari negara Perancis (Beck, 1999:83). Dikarenakan semakin lama tindakannya semakin meresahkan warga sipil dan tidak memiliki perkembangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya, pada akhirnya GAL dibubarkan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAL ini dikemudian dikenal sebagai “La Guerra Sucia” atau Perang Kotor (Beck, 1999:109).

Kesimpulan

Gaya kepemimpinan yang diktator dan tindakan diskriminasi terhadap budaya-budaya yang ada di beberapa wilayah di negara Spanyol menjadi awal mula tindakan separatistis yang dilakukan oleh kelompok ETA. Konflik yang telah terjadi lebih dari 50

tahun ini, telah banyak menjatuhkan korban jiwa, di mana sebagian besar warga sipil juga telah menjadi korban atas tindakan separatisme kelompok ETA tersebut. Untuk memperkuat kekuatan dan stabilitas penyerangannya, kelompok separatisme ETA mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok teroris dari negara lain yang menjadi jaringan internasional. Seperti hubungan yang terjalin antara kelompok separatisme ETA dan kelompok IRA. Kelompok IRA menjadi kiblat ataupun panutan bagi kelompok separatisme ETA untuk meluncurkan serangan terornya.

Dalam hal ini, kelompok IRA telah membantu kelancaran tindakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok separatisme ETA dengan memberikan bantuan logistik, senjata, dan strategi guna untuk keberhasilan serangan yang diluncurkan oleh kelompok separatisme ETA. Selain dengan kelompok IRA, kelompok separatisme ETA juga telah menjalin hubungan dengan FARC, FLB, *Baader Meinhof*, *Tupamaros*, *The Red Brigades*, *Sandinista*, serta beberapa negara yang ada di Timur Tengah.

Uni Eropa mencoba membantu untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di negara Spanyol tersebut, dengan menggunakan jalur ekonomi. Namun, hal tersebut juga mengalami kegagalan. Pasalnya, Pemerintah Spanyol dan seluruh elite politik yang berada di Parlemen Spanyol menolak keikutsertaan Uni Eropa untuk mencampuri urusan domestik negara Spanyol. Faktor-faktor dari segi ekonomi, sosial, dan budaya juga telah mempengaruhi konflik internal yang terjadi antara kelompok separatisme ETA dan Pemerintah Spanyol belum dapat menemukan jalan perdamaian.

Referensi

- Aiartza, U., dan Zabalo, J 2010, *The Basque Country: The Long Walk to a Democratic Scenario*, Berghof Transitions Series No.7.
- Alonco, R 2011, *The International Dimension of ETA's Terrorism and the Internationalization of the Conflict in the Basque Country* <http://www.paralalibertad.org/wpcontent/uploads/ETAs_international_dimension_ralons_090811.pdf> diakses pada 16 September 2017.
- Aust S 2008, *Der Baader Meinhof Komplex*. Hamburg: Hoffman und Campe.
- Balfour, S., (ed) 2003, *The Politics of Contemporary Spain*, dalam Sembiring, Kekerasan dan Kebebasan.
- Beck, MJ 1999, *The Continuity of Basque Political Violence: A Geographical Perspective on The Legitimisation of Violence*, *Geojournal*, Vol.48, No.2, Territorial Change and National Identities in Eastern and Western Europe.
- Collins, R 2012, *C-Escalation and D-Escalation: A Theory of the Time-Dynamics Conflict*, dalam *American Sociological Review*.77, No.1.
- Connolly, CK 2013, *Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and the European Union*, *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol.24:51.
- Council of Foreign Relations 2008, *Basque Fatherland and Liberty (ETA) (Spain, Separatists, Euskadi Ta Askatasuna)* <<http://www.cfr.org/separatists-terrorism/basque-fatherland-liberty-eta-spain-separatists-euskadi-ta-askatasuna/p9271>> diakses pada 15 Maret 2018.
- Daw, C 2012, *Cohesion policy of the European Union: Facilitated by Supranational Institutions and Regional Autonomy or Hindered by National Sovereignty?*, *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union*, Vol.2, Art.7.

- Edles, LD 1998, *Symbol and Ritual in the New Spain: The Transition to Democracy After Franco*, University Press, Cambridge.
- Europol Te-Sat EU 2012, *Terrorism Situation and Trend Report* <<http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/eurpolsat.>> diakses pada 16 September 2017.
- Edles, LD 1998, *Symbol and Ritual in the New Spain: The Transition to Democracy After Franco*, University Press, Cambridge.
- Gokcek, GG 2008, *Cooperation of EU Member States in Limiting Ethnic Conflict*, Department of Political Science Ellison Hall, University of California.
- Groppi, M 2018, *The Origins of the Red Brigades* <<http://www.ictyn.org/index.php/publications/online-content/169-terrorism-counterterrorism/614-the-origins-of-the-red-brigades>> diakses pada 13 Juli 2018.
- Jebb, C 2003, *The Fight for Legitimacy: Liberal Democracy Versus Terrorism*, The Journal of Conflict Studies, Vol. XXIII, No.1, Spring.
- Marchesi, A 2015, *Tupamaro: Guerrilla Organization, Uruguay* <<http://www.britannica.com/topic/Tupamaro>> diakses pada 13 Juli 2018.
- Martin A 2012, *And When Time Stood Still: Building a Road for Peace, Reconciliation, and Forgiveness in Euskadi (The End of ETA Armed Conflict)*, Hispanic Journal of Theory and Criticism, Vol.4, Iss.8, Art.16.
- Mess, L 2003, *Nationalism, Violence and Democracy: The Basque Clash of Identities*, New York Palgrave Mac Milan, New York.
- Merrill 1993, *Nicaragua: A Country Study* <<http://www.countrystudies.us/nicaragua>> diakses pada 13 Juli 2018.
- Nandi, HC 2016, *Mondragon Cooperatives: Bermula dari Impian Anak Muda* <<http://www.kopkunstitute.org/2016/08/18/modragon-cooperatives-bermula-dari-impian-anak-muda/>> diakses pada 13 Juli 2018.
- Official Journal of the European Union. *Council Common Position 2006/380/CSFP of 29 May 2016* <<http://www.eurlex.europa.eu/>> diakses pada 16 September 2017.
- Piccioli, I 2010, *European Integration and Stateless Minorities. The Trajectory of Basque Nationalism*, Roma, Department of History and Political Science, Luiss-Guido Carli.
- Pleschinger, S 2006, *Allied Against Terror: Transatlantic Intelligence Cooperation*, Journal of Yale University.
- Rolland, S 2006, *Mondragon Cooperatives, People Working Together*, UW-L Journal of Undergraduate Research IX
- Saideman, S 2002, *Discrimination in International Relations: Analyzing External Support for Ethnic Groups*, Journal of Peace Research Volume.39, No.27.
- Solomon, J 2012, "Exposing the ETA Financial Network", *World Check Terrorism and Insurgence Research Unit* <<http://www.cfft.org/publication/>> (diakses pada 15 Maret 2018).
- Varon, J 2004, *Bringing the War Home: The Weather Underground, the Red Army Faction, and Revolutionary Violence in the Sixties and Seventies*, University of California Press, Berkeley.
- Ward, L., M., dan Larramendy D 2010, "Basque Conflict Map," *Centre for Peace and Conflict Studies University of St. Andrews* <<http://www.st-andrews.ac.uk>> diakses pada 28 Januari 2018.